

Lembar Kerja Peserta Didik

Nama Kelompok:

_____	_____
_____	_____

Petunjuk Belajar

1. Silahkan baca sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945
2. Kerjakan setiap perintah yang diberikan
3. Jika sudah selesai silahkan diklik finis
 - masukkan email
 - masukkan kelas
 - LKPD Pend. Pancasila

Silahkan Aati Vidio dibawah ini.

Link Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=nj1STllmTj4&t=10s>

Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945



Sumber techno.okezone.com

1. Sejarah Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Ananda hebat, sebagai warga negara semestinya memahami konstitusi negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan konstitusi negara. Tahukah

Ananda apa arti dari Konstitusi? Istilah Konstitusi berasal dari berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Latin constitution yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum dasar. Konstitusi terdiri dari 2 macam yaitu Konstitusi tidak tertulis dan Konstitusi tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering disebut Konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Contoh Konvensi antara lain: 1. Pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah untuk mufakat; 2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR.

Konstitusi Tertulis merupakan aturan pokok dasar yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Undang-Undang Dasar merupakan

Konstitusi Tertulis. Undang-Undang Dasar mengatur tentang lembaga-lembaga negara, pembagian tugas-tugas pokok lembaga negara, serta cara kerja dari lembaga negara tersebut. Undang-Undang Dasar juga membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak bersifat otoriter dan bisa menjamin hak-hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

LEMBAR KERJA PERTAMA

Jawablah Pertanyaan Berikut!

Apa yang dimaksud konstitusi?

Apa yang dimaksud dengan Konvensi?

Apa saja contoh Konvensi?

Mengapa pidato presiden tanggal 16 Agustus dinamakan Konvensi?

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Sehingga penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan apapun yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPK pada Sidang kedua tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada sidang kedua BPUPK membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada masa sidang tersebut dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang terdiri dari 19 anggota dengan diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia tersebut membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A.Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim, Sukiman.

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil membahas dan menyepakati beberapa hal antara lain: 1. Lambang negara; 2. Negara kesatuan; 3. Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 4. Membentuk Panitia Penghalus Bahasa (Djajadiningrat, Salim, Soepomo). Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda: 1. Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan; 2. Perancangan Undang-undang Dasar terdiri dari Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan

Pada tanggal 15 Juli 1945, mengadakan sidang dengan agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Ir. Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Moh. Hatta, Soepomo. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI. Begitu juga usul-usul dari panitia keuangan dan panitia Pembela Tanah Air.

2. Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Para anggota PPKI lainnya merespon baik sambutan Soekarno. Proses pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Mohammad Hatta berjalan dengan cepat. Pembahasan berlangsung dalam suasana penuh rasa kekeluargaan, saling menghargai antar anggota, cermat, dan teliti. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah Pembukaan dan Batang Tubuh. Menurut Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan UUD menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hasil keputusan sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah:

1. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, telah dilakukan perubahan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPK. Perubahannya adalah: 1. Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan; 2. Sila Pertama yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa"; 3. Pasal 6 UUD yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli"; 4. Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sumber: https://ditsmp.kemdikbud.go.id/download/ppkn_modul-4_perumusan-dan-pengesahan-uud-nri/

LEMBAR KERJA KEDUA

PASANGKANLAH PERISTIWA DI BAWAH INI BERSERTA TANGGALNYA

**Pembahasan Lambang
Negara,
Negara Kesatuan**

tanggal 15 Juli 1945

**sidang agenda
pembicaraan tentang
pernyataan
kemerdekaan**

14 Juli 1945

**Pembahasan
Rancangan Undang-
Undang Dasar**

13 Juli 1945

Sidang II BPUPK

10 s/d 16 Juli 1945

LEMBAR KERJA KETIGA

CARILAH PASANGAN PERNYATAAN DAN JAWABAN DIBAWAH INI PADA KOLOM YANG TERSEDIA !

IR. SOEKARNO

TANGGAL 7 AGUSTUS 1945

MENGESAHKAN UUD NRJ TAHUN 1945
MENETAPKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MEMBENTUK KNJP

TANGGAL 18 AGUSTUS
1945

DOKURITSU JUNBI INKAJ

PERNYATAAN

JAWABAN

NAMA JEPANG PPKJ

KETUA PPKJ

TANGGAL
BERDIRINYA PPKJ

TANGGAL SIDANG
PPKJ

HASIL SIDANG
PERTAMA PPKJ

LEMBAR KERJA KEEMPAT

MENURUT KELOMPOKMU, APA ARTI PENTING UUD NRI TAHUN 1945 BAGI BANGSA INDONESIA?

BAGAIMANA JIKA BPUPK TIDAK MERUMUSKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR? APA YANG AKAN TERJADI?

PADA SIDANG PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, TERJADI PERDEBATAN MENGENAI RUMUSAN PEMBUKAAN UUD 1945. SALAH SATU POIN PERDEBATAN ADALAH MENGENAI RUMUSAN "KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA" YANG TERDAPAT PADA PIAGAM JAKARTA. JELASKAN DAMPAK DARI PERUBAHAN RUMUSAN TERSEBUT BAGI KEBERAGAMAN DI INDONESIA?

DARI KEGIATAN DIATAS, APAKAH KESIMPULAN YANG DIDAPAT DARI MATERI YANG DIDAPAT?